PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH UNTUK IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT TERHADAP PENDAPATAN PETANI DAN POLA PEMUKIMAN DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan

Oleh :

MUSLIM

NIM : 9761235

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani dan pola penggunaan tanah, sehingga dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijaksanaan selanjutnya untuk pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini digunakan metode diskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan digunakan analisa data primer dan sekunder, yaitu data diperoleh dari hasil penelitian disusun kedalam bentuk tabel menurut variabel penelitiannya yang diinterpretasikan secara diskriptif yang tujuannya untuk dapat menjelaskan pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani dan pola pengunaan tanah.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pendapatan petani meningkat setelah adanya Ibukota Kabupaten Lombok Barat, yaitu pendapatan petani satu tahun dari pertanian untuk tahun 2001 setelah adanya ibukota kabupaten berjumlah Rp. 47.404.300 dibandingkan pendapatan petani satu tahun pada tahun 1995 sebelum adanya ibukota kabupaten berjumlah Rp. 37.630.025 atau ada kenaikan sebesar 26 %. Dan pendapatan dari luar pertanian satu tahun pada tahun 2001 yaitu berjumlah Rp. 31.200.000 dibandingkan dengan pendapatan satu tahun pada tahun 1995 berjumlah Rp. 7.400.000, ada peningkatan sebesar 321,62%. Apabila dijumlah pendapatan dari pertanian dan diluar pertanian ada peningkatan pendapatan sejumlahRp. 33.584.025 atau sebesar 75,60 %, tetapi tingkat kehidupan petani dilokasi penelitian dari 30 sampel penelitian ini masih dalam kategori kemiskinan relatif. Pengaruh terhadap pola pemukiman terjadi di wilayah barat ibukota kabupaten yang dekat dengan pusat perdagangan (pasar Gerung), ketersediaan fasilitas, pelayan jasa dan aksesibilitas yang mendukung, pola pemukiman mengelompok dalam kawasan Tata Ruang Kota Gerung masih ada kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kota Gerung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HHALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
INTISARI viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Batasan Masalah 4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Kegunaan Penelitian 5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka 6
B. Kerangka Pemikiran 18
C. Hipotesis 20
D. Batasan Operasional 20

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 22
B. Lokasi Penelitian 22
C. Populasi dan Sampel 23
1. Populasi 23
2. Sampel Penelitian 23
D. Teknik Pengumpulan Data 24
1. Studi Dokumentasi 24
2. Wawancara 24
3. Observasi 25
E. Jenis Data dan Sumber Data 25
1. Jenis Data 25
2. Sumber Data 26
F. Teknik Analisis Data 26

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Letak 30
1. Letak Geografi dan Batas Administasi 30

2. Penggunaan Tanah 33
3. Perubahan Penggunaan Tanah 34
C. Keadaan Sosial Ekonomi 36
1. Jumlah Penduduk 36
2. Kepadatan Penduduk 37
3. Sektor Pekerjaan Utama di Kecamatan Gerung 38

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 40
1. Karekteristik Wilayah Perencanaan Kecamatan Gerung Sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat 40
2. Perubahan Penggunaan Tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat 45
3. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Terhadap Pendapatan Petani 47
a. Mata Pencaharian Pemilik Tanah 48
b. Pendapatan Pemilik Tanah 49
4. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Terhadap Pola Pemukiman 50
a. Pola Penggunaan Tanah 50
b. Rencana Tata Ruang Kota Gerung 54
c. Rencana Penggunaan Tanah 55
d. Rencana Detail Tata Ruang Kota Gerung 58
B. Pembahasan 62
1. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Terhadap Pendapatan Petani 62
a. Hubungan Luas Tanah Pertanian dengan Pendapatan Petani 62
b. Pendapatan Petani dari Pertanian dan di Luar Pertanian 63
c. Tingkat Kehidupan Petani 64
2. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Terhadap Pola Pemukiman di Kawasan Rencana Tata Ruang Kota Gerung 65
a. Pola Penggunaan Tanah untuk Pemukiman di Lokasi Penelitian 65
b. Perkembangan Pola Penggunaan Tanah 67
c. Kesesuaian Pola Pemukiman dengan Rencana Tata Ruang Kota Gerung 68

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria (Nomor 5 Tahun 1960) menyatakan bahwa Pemerintah membuat rencana umum tentang Persediaan, Peruntukan, Penggunaan Tanah tingkat Nasional. Berdasarkan rencana umum tersebut Pemerintah Daerah menyusun rencana persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah bagi daerahnya masing-masing mulai dari provinsi Daerah Tingkat I, Kota/Kabupaten Tingkat II.

> Dari bunyi pasal 14 UUPA, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menyediakan tanah untuk seluruh aspek kegiatan masyarakat : untuk pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan tentu tidak hanya sekali melainkan terus-menerus sesuai perkembangan masyarakat dalam waktu. (Muhammad Isa, 1983 : 15)

Penyelenggaraan pembangunan yang paling dibutuhkan adalah tanah, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang luasnya relatif tetap tidak bertambah. Dilain pihak kebutuhan tanah untuk pembangunan semakin meningkat baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun kegiatan pembangunan.

Kegiatan pembangunan seringkali menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan penggunaan tanah seperti : terjadi tumpang tindih peruntukan tanah, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali, penggunaan tanah yang

tertib penggunaan tanah sebagaimana tertuang dalam salah satu catur tertib pertanahan yaitu tertib penggunaan tanah belum bisa optimal dilaksanakan. Disamping itu adanya keinginan untuk meningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan serta kebutuhan tanah untuk pembangunan dapat juga menimbulkan perkembangan pola pemukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang hal ini antara lain terjadinya karena perubahan penggunaan tanah pertanian.

Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi bukan pertanian di suatu wilayah memang sulit untuk dicegah, hal ini akibat kebutuhan hidup yang terus meningkat dimana dari sektor pertanian belum mampu mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga. Oleh karena itu disamping sebagai petani juga mempunyai mata pencaharian lain yang juga membutuhkan tanah, seperti untuk perdagangan, jasa dan lain-lain, sehingga perubahan penggunaan pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindari. Bila kebutuhan hidup yang terus meningkat dari waktu ke waktu kecenderungan untuk mengubah pola hidup dari pertanian ke bukan pertanian semakin besar, demikian pula penggunaan tanah untuk sektor-sektor lain, seperti jasa, perumahan dan lain-lain yang merupakan dinamika dalam suatu pembangunan serta akibat dari pembangunan tersebut. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian terjadi karena adanya kepentingan baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah daerah seperti , seperti pemindahan ibukota kabupaten.

Kecamatan Gerung yang terdiri dari 6 Desa induk dan 4 desa baru dari

didominasi oleh pemukiman dan pelayanan jasa sosial dan kantor-kantor instansi pemerintah khususnya di daerah-daerah yang sudah terbangun. Dan yang belum terbangun adalah daerah pertanian.

Kecamatan Gerung merupakan gerbang bagi ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat dari arus transportasi laut, yaitu arus transportasi dari Pelabuhan Lembar. Kecamatan Gerung merupakan ibukota yang baru untuk ibukota Kabupaten Lombok Barat yang dahulu ibukota kabupaten Lombok Barat terletak di Kota Mataram. Karena sebagian besar tanah di Kecamatan Gerung (65 %) merupakan tanah pertanian sehingga mekanisme perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi bukan pertanian banyak terjadi akibat pemekaran kota (pemindahan ibukota Kabupaten). Terutama di pusat ibukota yang baru dan sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang diberi judul **" PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH UNTUK IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT TERHADAP PENDAPATAN PETANI DAN POLA PEMUKIMAN DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT "**

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang permasalahan diketahui bahwa pembangunan memerlukan tanah sedangkan tanah non pertanian sangat terbatas dan masyarakat (petani) juga memerlukan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian disekitar lokasi tersebut, baik terhadap fisik tanah maupun sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dari hal tersebut diatas penulis membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani di kawasan Tata Ruang Kota Gerung.
2. Bagaimanakah pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pola pemukiman di kawasan Tata Ruang Kota Gerung.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah untuk lebih memudahkan peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai lokasi penelitian dibatasi dalam kawasan Tata Ruang Kota Gerung.
2. Tanah pertanian yang berubah adalah tanah pertanian sawah untuk pusat

3. Petani di sini adalah petani pemilik tanah pertanian di Kawasan Tata Ruang Kota Gerung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani sekitar lokasi ibukota kabupaten di Kecamatan Gerung.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pola pemukiman di kawasan Tata Ruang Kota Gerung.

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan tambahan bagian tentang pengetahuan pemanfaatan tanah dalam hubungannya dengan keluarga masyarakat petani.
2. Untuk memberi masukan bagi arahan perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian dikaitkan dengan pendapatan petani sekitar Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Agar dapat memberikan informasi tentang pola penggunaan tanah yang berkembang akibat pengaruh perubahan penggunaan sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa pengaruh perubahan penggunaan tanah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani dan pola penggunaan tanah adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani dari sektor pertanian dimana luasan tanah mempengaruhi pendapatan pertanian sebesar 0,992 atau 99,2%, nilai korelasi ini berada pada 0,800 sampai dengan 1,00 atau korelasinya tinggi. Pendapatan kelompok tani meningkat dari pertanian dan di luar pertanian. Dengan pendapatan yang meningkat, tingkat kehidupan petani masih termasuk dalam kategori kemiskinan relatif.
2. Pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap pola penggunaan tanah sekitar kawasan Rencana Tata Ruang Kota Gerung Pola Penggunaan tanahnya belum ada pengaruhnya (tahun 1995 s/d tahun 2000) terbukti pola pemukiman mengelompok sejak sebelum ada pemindahan ibukota kabupaten pada wilayah barat Ibukota Kabupaten Lombok Barat, sedangkan untuk wilayah timur, utara dan selatan masih berbentuk linear mengikuti jaringan jalan. Antara pola penggunaan tanah pada saat penelitian dengan Rencana Tata Ruang Kota Gerung masih

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pendapatan petani baik dari pertanian maupun diluar pertanian diperlukan kebijakan-kebijakan antara lain :
   a. Perbaikan saluran irigasi karena luapan resapan air yang cukup besar apabila turun hujan yang berakibat kepada pertumbuhan padi
   b. Pemberian bantuan modal oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada petani untuk usaha diluar pertanian, seperti industri batubata dan genteng serta lain-lain untuk mengantisipasi bila tanah pertanian petani dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Ibukota Kabupaten Lombok Barat.
2. Perkembangan Kawasan Ibukota Kabupaten Lombok Barat harus tetap dipertahankan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Kota Gerung yaitu pada wilayah barat ibukota kabupaten. Untuk wilayah terbuka hijau yaitu wilayah timur dan utara ibukota kabupaten untuk tetap dipertahankan, dan untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan didalam kawasan Tata Ruang Kota Gerung harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Savita, (1996), *Dampak Perubahan Penggunaan Tanah dan Cara Penanggulangannya*, Lomba Penulisa Ilmiah Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Eko Budihardjo, (1992), *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota* , Alumni, Bandung.

Ery Nugroho, (1996), *Strategi Intensifikasi Melalui Teknologi Gulir : Upaya Mengantisipasi Laju Alih Guna Lahan yang Menunjang Swasembada Beras*, Lomba Penulisa Ilmiah Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Hadi Sabari Yunus, (2000), *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Herutomo Soemadi, (1999), *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah* , Yogyakarta.

I Made Sandy., (1977), *Penggunaan Tanah di Indonesia* , Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jendral Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Ibnu Syamsi, (1986), *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrogaman, dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Regional*, CV Rajawali, Jakarta

Lutfi I Nasoetion, (2000), *Pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pertanahan dalam menyongsong otonomi Daerah,* Seminar Nasional Pertanahan 2000, Yogyakarta.

Muhammad Isa, (1983), *Pengetrapan pasal 14,15 UUPA (Tentang Landuse Planning) Terhadap Pembangunan Nasional,* Publikasi Npmor 255, Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1989), *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Raldi Hendro Koestoer, (1997), *Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Teori dan Kasus,* UI-Press, Jakarta

Berupa peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, *Tentang Penataan Ruang*